

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu isu terlambatnya pembangunan. Kemiskinan adalah suatu sentral yang harus di tanggulangi dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemiskinan dipahami sebagai suatu kondisi yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup dengan layak.

Berbicara soal kemiskinan, di Indonesia sendiri masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Tidak dapat dipungkiri upaya-upaya penanggulangan direncanakan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tetapi upaya penanggulangan tersebut sering kali tidak menghasilkan sesuatu penyelesaian yang diharapkan. Negara berkembang memerlukan upaya nasional sebagai bentuk usaha yang dilakukan untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian akhirnya. Maka dari itu untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif diperlukannya suatu perencanaan.

Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta merta akibat dari malas bekerja, terdapat faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi situasi ini. Pada 2021, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang. Angka ini terus meningkat setiap waktunya. Pada 2020 saja, terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,13 juta hanya dari bulan Maret hingga September.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan berbagai upaya penanggulangan dari sisi pengurangan kemiskinan dilakukan pemerintah di antaranya yaitu pemberian modal, pemberdayaan masyarakat, menciptakan peluang kerja, mengembangkan kemampuan dan menciptakan perlindungan sosial tidak bisa dilakukan secara linier tetapi upaya pemecahannya juga harus multidimensi.

Kementrian Sosial RI menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) keseluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini diperuntukan untuk keluarga yang kurang mampu atas dasar dari basis data terpadu dari pusat. Program Keluarga Harapan yaitu suatu program bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat yang tergolong dalam rumah tangga yang sangat miskin (RTSM) yang berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2014, bertransformasi dari program rintisan terbatas menjadi salah satu bantuan sosial (bansos) utama dengan target 10 juta

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Tahun 2014: Cakupan PKH ditargetkan sebesar 3,2 juta keluarga (KPM). Perkembangan (2015-2017): Pemerintah secara bertahap memperluas jangkauan PKH hingga menjangkau beberapa juta keluarga miskin di seluruh provinsi. Tahun 2018-2019: Cakupan meningkat pesat, ditargetkan mencapai 10 juta KPM untuk merespons kebutuhan penanggulangan kemiskinan yang lebih luas. Tahun 2020-2023: Selama masa pandemi COVID-19 hingga pasca-pandemi, jumlah target KPM PKH konsisten di angka 10 juta keluarga. Tahun 2024-2025: Pemerintah melanjutkan program PKH untuk 10 juta KPM dengan fokus pada data terpadu (SIKS-NG) agar penyaluran lebih tepat sasaran. Tahun 2026 (Saat Ini): PKH tetap menjadi andalan perlindungan sosial nasional dengan rincian komponen penerima yang diperketat (ibu hamil, balita, lansia, disabilitas, anak sekolah).

Program Keluarga Harapan membantu Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan rakyat Indonesia, dan berdasarkan data dari Kementerian Sosial, bahwa Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia terus meningkat. Tahun 2014 berjumlah 2,798 juta KPM dan di Tahun 2018 berjumlah 10 Juta KPM. Anggaran PKH sejak tahun 2014 awalnya hanya 5,6 triliun meningkat secara drastis menjadi 34,4 Triliun di Tahun 2018 (www.kemensos.go.id).

Hal yang sama dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa-desa. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya di bidang perekonomian. Pemerintah

Kabupaten Hulu Sungai Utara berupaya menerapkan Program Keluarga Harapan dengan harapan agar hasil yang didapat sama dengan kabupaten atau kota lainnya di Indonesia. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah dilaksanakan sejak dari Tahun 2014.

Berdasarkan wawancara melalui WhatsApp dengan pendamping PKH Desa Sungai Panangah, yang melaksanakan program keluarga harapan sebanyak 67 KK.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa fenomena masalah yang terjadi pada Desa Sungai Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1. Terdapat sejumlah keluarga penerima yang meskipun telah menerima bantuan selama beberapa periode masih belum mampu keluar dari lingkaran kemiskinan

(Sumber: Observasi Peneliti)

2. Bantuan yang diberikan belum cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan sehari-hari

(Sumber Data : Observasi Peneliti)

3. Kurangnya dukungan tambahan dalam pengembangan kapasitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga secara mandiri.

(Sumber: Observasi Peneliti)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN. Desa**

Sungai Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Efektivitas program dilihat dari Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Panangah. Untuk mempermudah pengolahan data dalam penelitian ini sehingga hanya difokuskan pada efektivitas program menurut teori Edy Sutrisno, 2007 : 125-126 tentang indikator menentukan kriteria efektivitas :

1. Pemahaman Program.
2. Tepat Sasaran.
3. Tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan.
5. Perubahan nyata.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijabarkan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimanakah Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dilihat melalui Pelaksanaan di Desa Sungai Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Faktor apasaja yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dilihat melalui Pelaksanaan di Desa Sungai Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sungai Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

a. Manfaat Teoritis

Dari Aspek Keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran, pengalaman peneliti dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

